

## KESETARAAN HAK SERTA RESIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN SUMATERA BARAT

Soraya Oktarina<sup>1</sup>, Desy Syafriani<sup>2</sup>, Khafifah Fathiniah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Correspondence Email : sorayaoktarin4@gmail

### ABSTRACT

*The openness of the reform era and advances in communication, technology and information provide space for the media industry to thrive, from print, electronic to digital media. The press, an industry that opens up access for anyone, both men and women. Women take advantage of this to participate and choose the press as one of their employment options. As a result, the number of female journalists is increasing. However, regulations for the protection of female journalists have not been specifically created. Female journalists are often faced with obstacles and are even forced to struggle with the risk of gender-based violence. The research method used in this research is descriptive qualitative. The aim of the research is to look at the challenges faced by female journalists from West Sumatra in carrying out their profession, as well as the threat of gender-based violence they receive while working in the world of journalism. The research results show that there are a number of problems that female journalists in West Sumatra have to face. The matrilineal concept has two impacts, on the one hand, this culture is a reason for society to respect women, including the group of women journalists, on the other hand, it actually castrates women's freedom to mix in the masculine realm*

**Keyword** : *journalist; gender; violence*

### ABSTRAK

*Keterbukaan era reformasi dan kemajuan komunikasi, teknologi dan informasi memberikan ruang bagi industri media untuk tumbuh subur, mulai dari media cetak, elektronik, hingga digital. Pers, industri yang membuka ruang akses bagi siapa saja, baik laki laki ataupun perempuan. Hal ini dimanfaatkan perempuan, untuk ikut serta dan memilih pers sebagai salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Dampaknya, jumlah jurnalis perempuan kian meningkat. Namun regulasi untuk perlindungan jurnalis perempuan belum dibuat secara khusus. Jurnalis perempuan acap terbentur bahkan terpaksa bergumul menghadapi resiko kekerasan berbasis gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Adapun tujuan penelitian adalah untuk melihat tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan Sumatera Barat dalam menjalani profesinya, hingga ancaman kekerasan berbasis gender yang mereka terima selama bergelut di dunia kewartawanan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah problematika yang harus dihadapi jurnalis perempuan di Sumatera Barat. Konsep matrilineal memberikan dua mata dampak, disatu sisi budaya ini menjadi alasan masyarakat untuk menghargai perempuan termasuk kelompok perempuan jurnalis, disisi lain justru mengkebiri keleluasaan perempuan untuk bercampur di ranah maskulin*

**Kata Kunci** : *jurnalis; gender; kekerasan*

## PENDAHULUAN

Salah satu parameter negara demokrasi adalah keterbukaan akan akses informasi (Pasaribu.id). Pasca reformasi dan dijaminnya kebebasan pers di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, industri media mengalami perkembangan pesat. Berbagai perusahaan media bermunculan, baik elektronik, cetak, dan online. Menjamurnya industri media, membuat pers mulai dilirik dan diminati oleh semua orang. Dunia jurnalistik, tak hanya menjadi bidang profesi keahlian, namun mulai menjadi lapangan pekerjaan yang kian di buru. Dewan Pers Indonesia pada tahun 2020 memperkirakan jumlah media pers sebanyak 47.000 yang terdiri dari 43.300 media daring, 2.000 media cetak, 674 radio dan 523 media televisi (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Pers bukanlah sebuah profesi yang tertutup, semua orang dari latar belakang apa pun, bisa menjadi jurnalis. Profesi jurnalis tak pula dibatasi gender. Pers adalah profesi yang membuka luas kehadiran perempuan untuk berkarya di dalamnya. Meski jumlah perempuan belum sebanding dengan laki-laki, namun keberadaan kaum perempuan di dunia jurnalistik mulai meningkat. Aliansi jurnalis Independen menyebutkan pada tahun 2012, hanya terdapat sekitar 18,6% jurnalis perempuan dari total 1.868 anggota AJI se-Indonesia (Luviana, 2012). Sementara itu, Nurul Hasfi *et.al*, (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai tak lebih dari 25%. Meski belum banyak, namun jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Bahkan dari 1000 jurnalis, 200-300 merupakan perempuan (Lani & Azmi, 2023).

Di Sumatera Barat, keberadaan jurnalis perempuan juga mulai bermunculan, baik sebagai jurnalis televisi, cetak, radio ataupun online. Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi

Sumatera Barat menyebutkan, sebanyak 60% tenaga profesional di Sumbar diisi oleh perempuan, salah satunya adalah proses sebagai tenaga jurnalis.

Jurnalistik merupakan sebuah profesi yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat umum baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi bahkan media online. Kegiatan jurnalistik merupakan serangkaian kegiatan yang kompleks dan terstruktur, mulai dari mencari data dilapangan, pengolahan data, penulisan naskah berita hingga menghasilkan output berita jurnalistik yang layak dan patut disampaikan ke publik. Dunia kerja wartawan seolah tak mengenal waktu. Jurnalis harus siaga setiap saat, baik itu pagi, siang, ataupun malam hari. Begitu tugas memanggil, seorang jurnalis tidak bisa menghindari melakukan liputan maupun menulis/melaporkan. Ketika melakukan liputan, seorang jurnalis berkemungkinan berhadapan atau mengalami sejumlah kejadian yang tidak terduga. Maka tak heran, dunia jurnalis kerap identik dengan sisi maskulin.

Masuknya perempuan ke ranah jurnalis, memberikan tantangan tersendiri yang harus mereka lewati dan taklukan. Kebutuhan informasi yang terupdate membuat dunia jurnalis tetap hidup selama 24 jam perhari. Sama halnya dengan laki laki, jika perempuan telah memutuskan menjadi jurnalis, maka perempuan harus mau melakukan pekerjaan peliputan tak kenal waktu dan tempat. Situasi ini tidak mudah bagi perempuan di negara yang masih kuat nilai-nilai patriarkinya seperti Indonesia. Belum lagi masalah keamanan saat meliput yang acap berisiko bahkan peluang timbulnya tindak kekerasan yang mungkin saja terjadi pada jurnalis perempuan. perempuan jurnalis mengalami kerentanan berlapis atas terjadinya kekerasan seksual. Menjelang akhir 2021, kekerasan terhadap jurnalis perempuan di Asia mendapat perhatian, yakni Maria Ressa seorang jurnalis asal

Filiphina yang mengalami rangkaian kasus kekerasan di negaranya” (Henley et al.,2021).

Riset yang dilakukan UNESCO pada 2020 menunjukkan 73% jurnalis perempuan di dunia mengalami kekerasan di ranah digital (Posetti et al., 2020). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dari 34 responden jurnalis perempuan yang disurvei, 25 di antaranya (73%) pernah mengalami kekerasan seksual selama tahun 2020 (AJI Indonesia, 2021). Angka kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga diperoleh berdasarkan hasil survei nasional 2021 (pr2media.or.id) tentang “Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia” yang melibatkan 1.256 responden jurnalis perempuan. Hasil survei menyebutkan dari 1.256 jurnalis perempuan, sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka. Sebanyak 880 orang jurnalis (70%) pernah mengalami kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik, 99 orang jurnalis (8%) pernah mengalami kekerasan di ranah digital saja dan 98 orang jurnalis (8%) pernah mengalami kekerasan di ranah fisik saja. Setidaknya, terdapat 10 jenis tindak kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, yakni Body shaming, Catcalling, Menerima pesan teks, audio visual seksual, Sentuhan fisik seksual yang tak diinginkan, Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara langsung ataupun daring, Diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara langsung, Dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku hingga dipaksa melakukan hubungan seksual secara langsung (Santika, 2023).

Lalu bagaimana dengan keadaan jurnalis perempuan di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah daerah yang menganut sistem matrilineal. Dimana perempuan telah sejak dulu memegang

kedudukan dan posisi sentral. Perempuan di Minangkabau, mendapat kehormatan dan perlakuan khusus. Tak hanya itu berbicara tentang profesi jurnalis bagi perempuan di Sumatera Barat, bukanlah hal yang baru. Sumatera Barat bahkan memiliki seorang tokoh nasional yang berprofesi sebagai pemberita. Sebut saja Rohana Kudus. Seorang jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Gairah perjuangan menyelimuti jiwa Rohana, sehingga ia berinisiatif membuat surat kabar. Pada 10 Juli 1912, surat kabar Soenting Melajoe menjadi surat kabar pertama yang didirikan dan dikelola oleh perempuan.

Kepercayaan matrilineal yang menempatkan perempuan dalam posisi sentral, memaknai adanya penghargaan terhadap kedudukan perempuan. Kondisi ini sejogjanya menjadi pembeda dari daerah lain dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Namun realitanya, perempuan di Sumatera Barat masih saja menghadapi kekerasan-kekerasan berbasis gender seperti perlakuan diskriminasi, ancaman kekerasan, beban ganda, dan stereotip, tak terkecuali bagi kelompok perempuan jurnalis.

Oktri Permata Lani dan Novia Amirah Azmi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Gerak Jurnalis Perempuan Dalam Peliputan Berita di Indonesia”, menyebutkan permasalahan gender masih saja terjadi dalam profesi jurnalis, sehingga baiknya para jurnalis perempuan membuat organisasi yang terlegalitas atau bergabung dengan organisasi formal agar dapat mempertahankan dirinya sebagai jurnalis perempuan, sehingga nantinya tidak ada perbedaan alur pekerjaan dengan jurnalis laki-laki. Sementara itu, Aldi, Wardhana Putra (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Komunikasi Co-cultural pada Jurnalis Perempuan yang Mengalami Diskriminasi Berbasis Gender (Studi Fenomenologi Feminis pada Jurnalis Perempuan di Kota Padang menyatakan*

Jurnalis perempuan mengalami diskriminasi berbasis gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip negatif, kekerasan seksual, dan hak-hak normatif mereka yang terabaikan, seperti cuti haid dan ketersediaan ruang laktasi. Jurnalis perempuan juga mendapatkan proses pembungkaman dari diskriminasi gender yang mereka terima, seperti ejekan, ritual, kontrol, dan pelecehan.

Berdasarkan data dan uraian fenomena yang peneliti sampaikan diatas, maka peneliti menganggap perlu untuk melihat dan menggambarkan lebih lanjut bagaimana kondisi jurnalis perempuan Sumatera Barat saat ini, bagaimana tantangan dan resiko kekerasan berbasis gender yang mungkin saja mereka dapatkan selama menjalani profesi kewartawananya. Untuk itu artikel ini, peneliti beri judul "*Kesetaraan Hak Serta Resiko Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Jurnalis Perempuan Sumatera Barat*".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Penilitan kualitatif yakni penelitian yang berusaha menganalisa suatu fenomena lapangan dengan menemukan sebab dan akibat yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang valid tentang jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi pada jurnalis perempuan Sumatera Barat bersera resiko ancaman yang mungkin timbul, serta tindak lanjut yang sudah ada. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan advokasi, membuat penelitian lanjutan, dan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan mencari informasi kepada organisasi-organisasi

yang relevan melibatkan informan dan responden dari organisasi jurnalis seperti: jurnalis anggota AJI Padang, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar, IJTI, Jaringan Jurnalis Bencana Sumbar, LBH Pers Padang, jurnalis perempuan, dan akademisi. Penelusuran secara langsung juga dilakukan dengan mencari informasi secara personal. Sedangkan penelusuran daring dilakukan melalui email, WhatsApp, Facebook, dan Instagram dan konten publikasi media.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jurnalis Perempuan Masih Kerap Mengalami Diskriminasi**

Perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam masyarakat. Berbicara perempuan di dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat, berarti berbicara tentang persoalan atribut sosial atau yang disebut gender. Permasalahannya, perempuan kerap difokuskan pada peran domestik dan reproduksi saja, sehingga menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat tersebut, konsep gender lahir guna merekonstruksi dan memberikan peluang yang sama tanpa dipengaruhi oleh perbedaan (Rohmansyah, 2016). Tujuan utama gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan berperan aktif dalam ranah publik.

Negara Indonesia belum menjadi negara yang memiliki kesetaraan gender optimal. Nilai indeks ketimpangan gender Indonesia tahun 2022 masih berada di angka 0,459 (Badan Pusat Statistik, 2023). Sementara untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun 2022 sebesar 0,430. Nilai indeks ini merunut pada perhitungan indeks ketimpangan gender WEF dengan

rentang skala 0-1. Skor "0" menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar, dan skor "1" menunjukkan tercapainya kesetaraan penuh. Dengan kata lain, indeks ketimpangan gender di Indonesia masih harus dikejar dan belum berada pada posisi yang mendekati setara.

Peran perempuan berdasarkan gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan (Habibillah, 2018). Persoalan ketimpangan paling dirasakan oleh perempuan ketika berhadapan dengan perannya di sosial-kemasyarakatan, terkhusus pada ranah pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja sudah tidak dapat terelakkan. Banyak posisi dalam berbagai pekerjaan membutuhkan tenaga seorang wanita. Perempuan secara pribadi telah memiliki bekal kemampuan akademik, keahlian dan pengalaman. Sehingga, bukan hanya karena faktor ekonomi, keputusan perempuan masuk ke dunia kerja, juga disebabkan oleh keinginannya untuk mengembangkan diri dan terjun ke dunia karier. Fenomena ini membuat seiring waktu ketimpangannya pekerja laki laki dan perempuan semakin mengecil. Di Sumatera Barat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kelompok laki laki tahun 2022 sebesar 82,58 persen dan kelompok perempuan sebesar 56,28 persen (BPS, 2022).

Meski kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama, namun masih terdapat hambatan secara institusi maupun sosial budaya bagi perempuan pekerja. Persoalan menjadi kian kompleks, ketika perempuan memutuskan masuk kebidang pekerjaan yang terlabelkan maskulin. Terdapat stereotip yang terbentuk di dalam masyarakat mengenai pekerjaan manusia, meliputi maskulin, feminime dan netral. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kepribadian atau kualitas yang dianggap diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut (Cejka &

Eagly, 1999; Shinar,1975), serta jumlah laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan tersebut (Adachi,2013; Eagly & Stefen, 1984). Maskulin berkaitan karakteristik kepercayaan diri, independen, ambisius, tegas, kontrol, dominan, kompetitif. Sementara kualitas feminin berkaitan dengan karakteristik peduli kepada kesejahteraan orang lain, seperti memberikan afeksi, nurturing, halus, lembut, ramah, tidak egois dan ekspresif (Eagly & Karau, 2002). Pekerjaan maskulin kerap dicirikan sebagai pekerjaan yang menuntut kekuatan, keberanian, dan kemampuan bertahan hidup yang diasumsikan hanya dimiliki oleh laki-laki. Stereotip pekerjaan feminin dan maskulin ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pekerja, terutama jika orang yang melakukan pekerjaan, berlawanan gender dengan label stereotip pekerjaannya.

Menjadi jurnalis, merupakan salah satu pekerjaan yang sering terstereotipkan maskulin. Jurnalistik merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mencari, mengolah dan menyampaikan suatu informasi dalam bentuk berita kepada khlayak umum (Mappatoto, 1993). Eriyanto, Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia di dalam wawancara yang di muat pada laman Kompas.tv dengan artikel berjudul "Dianggap Pekerjaan Maskulin, Mahasiswi Jurnalistik Enggan Jadi Jurnalis" yang terbit tanggal 12 Juli 2021, mengatakan: "*jurnalis secara umum dipandang sebagai profesi yang maskulin. Hal ini hasil konstruksi sosial di masyarakat, diperkuat oleh beragam produk budaya, serta ada bias jender dalam praktik jurnalistik*". Sementara Nani Afrida, Ketua bidang Gender AJI Indonesia menyebutkan "*Lanskap media di Indonesia hingga saat ini masih dianggap sangat didominasi oleh maskulitas. akibatnya, jurnalis perempuan rentan mengalami pelecehan dan*

*diskriminasi* (dalam dw.id publish 9 Februari 2022).

Menjadi jurnalis, pekerjaan yang berkebutuhan dengan *deadline*, kecepatan perburuan data dan fakta, hingga rawan resiko. Jurnalis kemudian menjadi pekerjaan tinggi tekanan, menuntut konsentrasi penuh, waktu tanpa batas, kekuatan, keberanian hingga menguras tenaga dan pikiran. Tak jarang, menekuni dunia jurnalis tak dapat dilakukan sampingan atau setengah-setengah. Hal ini kemudian, menjadi tantangan ketika berhadapan dengan perempuan yang identik dengan peran utama pemenuhan tugas domestik.

## **2. Budaya Patriarki Masih Menghantui Profesi Jurnalis Perempuan**

Berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan di ranah manapun tak terlepas dari peran pembentukan stigma sosial masyarakat. Konstruksi sosial yang melekat kepada laki-laki dan perempuan sering diistilahkan dengan gender. Teori mengenai gender meliputi tiga kajian, yakni *nature*, *nature* dan *equalibrium*. Teori *nature* mengajarkan bahwa terdapatnya peran yang berbeda antara laki laki dan perempuan akibat adanya hasil dari konstruksi budaya. teori *nature* lebih mengedepankan bahwasanya perempuan dan laki laki itu sudah memiliki perbedaan secara alamiah dan kodrat. Perbedaan inilah nantinya yang akan menyebabkan perbedaan peran dan tugas dari keduanya. Sementara itu Teori *equalibrium* atau teori keseimbangan mengatakan laki laki dan perempuan bukanlah suatu hal yang harus dipertentangkan melainkan harus saling bekerjasama dalam menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Kesetaraan gender bisa terwujud jika adanya keadilan dan tidak terdapatnya ketimpangan. Ketimpangan gender bagi kaum perempuan biasanya disebabkan

oleh adanya perbedaan peran yang terbentuk dari hasil konstruksi budaya. Ketimpangan tersebut berbentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, hingga beban kerja ganda.

Pola patriarki yang begitu mengakar membuat posisi perempuan menjadi rentan. Kekerasan terhadap jurnalis perempuan terjadi bukan karena profesinya, tetapi karena mereka perempuan. Sistem patriarki yang melekat di masyarakat menimbulkan ketimpangan gender yang mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Perempuan tidak mendapatkan tempat yang lebih sejajar dengan laki-laki karena keterbatasan akses yang ada baik itu di ruang publik, maupun privat. Perempuan sering dilihat hanya sebatas lapisan bawah laki-laki. Persepsi dalam masyarakat patriarki menyatakan bahwa laki-laki selalu mempunyai hak istimewa dari perempuan. Dalam tatanan sosial masyarakat patriarki, Perempuan identik dengan wilayah domestik. Sebagai seorang perempuan tugas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan “Kasur, dapur dan sumur”. Sebelum memutuskan terjun ke ranah publik, perempuan akan ditagih apakah ia telah memenuhi tugas “keperempuannya”. Hal ini sangat berbeda dengan tuntutan yang diberikan terhadap laki-laki yang memang diposisikan sebagai “si pencari nafkah”.

Konstruksi perbedaan porsi terhadap laki laki dan perempuan saat ini terus mengalami kemajuan disokong makin maraknya isu-isu dan diskursus tentang kesetaraan gender. Ruang publik mulai terbuka dan bisa diakses oleh perempuan. Rasio perempuan untuk bersekolah sudah hampir sama besar dengan laki laki. Kesempatan perempuan untuk bisa bekerja juga terbuka lebar. Namun realitanya cara berpikir patriarki masih begitu mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Dalam pekerjaan, masyarakat dalam memilih pemimpin atau atasan masih berdasarkan pelabelan

atribut jenis kelamin dan gender (Sany & Rahardja, 2016). Pada stereotip yang terbangun, perempuan tidak layak untuk menempati kursi kepemimpinan karena karakteristik yang dimilikinya. Kursi kepemimpinan dianggap sesuai dan dinilai positif apabila ditempati oleh laki-laki. Sehingga, apabila kursi kepemimpinan ditempati oleh perempuan, peran ini dianggap tidak sesuai dan dinilai secara negative.

Sumatera Barat merupakan daerah yang terkenal dengan sistem matrilineal atau *matriarkat*. Dalam adat yang menganut sistem matrilineal, posisi perempuan lebih mendapat tempat. Posisi sentral perempuan di adat Minangkabau dilambangkan dengan keberadaan bundo kanduang. Masyarakat matrilineal memberikan posisi penting pada perempuan dalam menentukan garis keturunan. Perempuan memiliki kuasa pada garis keturunan dan memiliki kontrol akan tanah dan rumah. Tidak itu saja, dalam berbagai hal yang terkait kemasyarakatan dan kesukuan, perempuan memiliki hak suara yang penting. Hak ini lebih tinggi dari sekedar, 'hak berpendapat'. Perempuan memiliki hak suara sama dengan lelaki. Sebelum pemutusan hal-hal terkait adat dalam suku, pendapat perempuan harus ditanyakan lebih dahulu. Contohnya, jika ada keputusan yang tidak disetujui pihak perempuan, keputusan itu tidak berlaku. (Blackwood, 2001).

Selain tentang kedudukan perempuan dalam adat matrilineal, keberadaan perempuan minang dalam profesi jurnalis juga bukan merupakan hal yang baru. Rohana Kuddus, seorang perempuan asal Minangkabau memilih menjadi wartawan sebagai jalan perjuangannya. Dari tulisannya, Rohana mencoba menawarkan konsep kesetaraan gender dengan mengoptimalkan fungsi dan karakter alamiah dari perempuan. Rohana Kuddus berhasil menerbitkan *Sunting Melayu*

pada tanggal 10 Juli 1912 di Padang dan beredar luas ke seluruh daerah terutama di wilayah Sumatera Barat yang waktu itu lebih dikenal dengan Sumatera Tengah. Di antara tulisan Rohana Kuddus yakni Setia Gerakan Perempuan Zaman Ini (SM 23 Mei 1913), Perhiasan Pakaian (SM 7 Agustus 1912), Perempuan (SM 15 Desember 1918), Mencari Isteri (19 Desember 1920) dan seterusnya. Pada saat itu, susunan redaksi mulai dari pemimpin redaksi, redaktur, dan penulis semuanya perempuan. Surat Kabar *Sunting Melayu* menyoroti segala hal tentang perempuan, isinya berisi syair, tajuk rencana dan karangan yang menggambarkan keistimewaan perempuan. Keberadaan Rohana Kuddus, membuktikan bahwa perempuan Minangkabau sudah kritis dan berdaya dari dulunya.

### **3. Kondisi Kesetaraan Jurnalis Perempuan Sumatera Barat**

Saat ini di Sumatera Barat, angka jurnalis perempuan tak ubahnya dengan daerah lain, bertambah namun tak lebih atau sebatas menyamai jumlah jurnalis laki-laki. Hingga saat ini, tak ada yang bisa merilis jumlah pasti keseluruhan jurnalis perempuan di Sumatera Barat. Data keberadaan jurnalis perempuan diperoleh dari organisasi jurnalis. Pada Organisasi Aliansi Jurnalis Independensi (AJI) Padang, dari sekitar 40-50an anggota, jumlah jurnalis perempuan paling banyak berjumlah 10 orang. Pada Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumbar, dari 70an Anggota, jumlah jurnalis perempuan berkisar sebanyak 6-10 orang, Sementara itu pada organisasi jurnalis khusus perempuan Sumbar atau yang bernama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) wilayah Sumbar, keanggotaan perempuan mencapai 40 orang lebih. Di luar itu, masih banyak terdapat jurnalis-jurnalis perempuan yang tidak tergabung ke dalam organisasi jurnalis manapun.

Organisasi jurnalis perempuan di Sumatera Barat telah ada dan terbentuk sejak lama. Pada tahun 1998. Organisasi tersebut bernama Forum Komunikasi Wartawati Indonesia Sunting Nagari. Forum ini terbentuk atas rasa ketidak-terimaan akan diskriminasi yang dialami oleh jurnalis perempuan pada masa tersebut. Salah Satu penggagas berdirinya forum ini yakni Anita yang saat ini juga menjabat sebagai ketua FJPI Sumbar mengatakan: pada tahun 1998, jurnalis perempuan masih terhalang dengan stigma sosio-kultural, meski tidak ada aturan tertulis perusahaan, namun perempuan tetap dilarang bekerja di atas jam 5 sore, akibatnya jurnalis perempuan tidak dapat menunggu hasil editor akhir dan memastikan tulisannya layak terbit atau tidak. Tak hanya itu, jurnalis perempuan juga tidak diberikan kesempatan untuk turut serta meliput peristiwa dan liputan perjalanan. Hal ini kian diperparah, ketika adanya aturan perusahaan media yang melarang pernikahan sesama karyawan dan memaksa pihak perempuan untuk mengalah dan mundur dari pekerjaan.

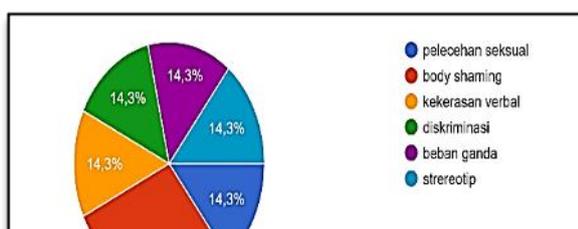
Hambatan serta ketimpangan gender yang terjadi pada jurnalis perempuan nyatanya terus berlanjut hingga saat ini. Meski telah banyak ruang akomodasi, mediasi dan diskusi tentang perlunya kesetaraan bagi perempuan di ruang publik, tak serta merta mereposisi kesetaraan perempuan, terutama jurnalis. Dari 20 jurnalis perempuan Sumbar yang dipilih secara acak, setengah dari jumlah responden mengaku pernah mengalami kekerasan bersifat gender.

Kekerasan berbasis Gender yang dialami oleh jurnalis perempuan meliputi; pelecehan seksual, *body shaming*, kekerasan verbal, diskriminasi, beban ganda, hingga stereotip yang dipikulkan kepada jurnalis perempuan. Namu dari keseluruhan informan, mengaku tindakan kekerasan yang mereka alami hanya disimpan sendiri, karena berada dalam skala ringan dan masih bisa diselesaikan dengan komunikasi. Berdasarkan wawancara dengan Novia Harlina, Pengurus AJI Padang bidang Gender mengemukakan: *“Kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan itu banyak terjadi, baik dari yang skala ringan berupa stigmatisasi, stereotip, marginalisasi, subordinasi, hingga kasus skala berat pelecehan. Namun hingga saat ini belum ditemukan satupun kasus pelaporan kekerasan oleh jurnalis perempuan”*. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Di ranah manapun, kasus kekerasan terhadap perempuan seperti air yang sewaktu waktu dapat menguap, hilang dan tak berbekas. Tak berbeda dengan jurnalis, perempuan jurnalis yang seharusnya kritis, pandai menyuarakan segala peristiwa ke dalam laporan, ternyata juga tak banyak yang berani bersuara. AJI Padang melihat ada tiga alasan mengapa pelaporan kekerasan oleh jurnalis perempuan tak pernah ada, yakni faktor ketidaksadaran, diwajibkan, dan takut melapor. *Pertama*, terdapat stigma bahwa kasus kekerasan yang dialami perempuan dianggap sebagai aib bagi perempuan itu sendiri, sehingga banyak korban memilih tidak

Gambar 1.

Kekerasan gender yang pernah dialami jurnalis perempuan Sumatera Barat

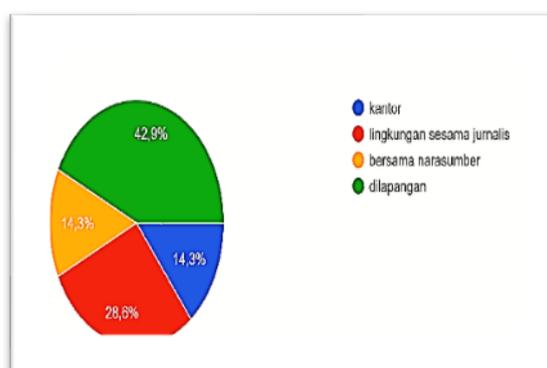


melaporkan. *Kedua*, faktor dari diri perempuan yang cenderung tidak sadar sedang mengalami pelecehan. Dan *ketiga* seringkali kasus kekerasan yang terjadi “diwajarkan”, maksudnya pekerjaan jurnalis sering dianggap sebagai profesi maskulin dan penuh tantangan, terjadinya kekerasan atau ketidakbiasaan yang dialami jurnalis perempuan, seringkali diterima sebagai resiko dari pekerjaan, sehingga jika terjadi kekerasan atau bahaya, baik jurnalis ataupun lingkungan memilih untuk mewartakan.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Direktur LBH Pers Padang, Aulia Rizal yang akrab disapa Paul. Ia mengemukakan bahwa banyak terjadi kekerasan atau resiko bagi para jurnalis tak hanya perempuan. Namun posisi perempuan, lebih rentan dan sering tertutupi dikarenakan ketidakberanian untuk membawa persoalan tersebut ke ranah publik dengan alasan aib pribadi. Hingga saat ini baru satu jurnalis perempuan yang pernah melapor dan ditangani oleh LBH Pers Padang, terkait kasus pelecehan seksual. Namun, belum sempat di proses, kasus tersebut urung dilanjutkan atas permintaan dari “korban”. Keputusan ini dilakukan karena korban mendapat pertentangan dari keluarga dan lingkungan sekitar karena dianggap melakukan perbuatan memalukan dan menyebarkan aib pribadi. Ada semacam keengganan dari pihak korban karena berkaitan dengan harga diri dan citra institusinya. Persoalan yang berbeda juga pernah dilaporkan ke LBH Pers Padang, terjadi pada jurnalis perempuan di satu kabupaten. Kali ini baik korban ataupun pelaku sama-sama berasal dari kalangan jurnalis. Perbedaan cara pandang dalam melihat masalah, menimbulkan perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak yang berujung jurnalis perempuan kemudian diancam, diintimidasi dan mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan.

Peluang kekerasan bagi jurnalis perempuan dapat terjadi dimana saja, mulai dari ranah privat perempuan itu sendiri hingga ke lingkungan sosial masyarakat. Kekerasan terhadap jurnalis perempuan bukan hanya tentang kekerasan seksual, namun juga mencakup ketidak-seimbangan pemenuhan hak dan kesempatan yang didapat oleh perempuan dalam menjalani profesinya.

Gambar. 2  
Ranah Terjadinya Kekerasan Pada



#### Jurnalis Perempuan

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa jurnalis perempuan Sumbar yang dipilih secara acak. Ranah kekerasan terhadap perempuan yang paling rentan menimpa jurnalis terjadi di lapangan sebesar 42,9%. Selanjutnya, disusul pada ranah lingkungan sesama jurnalis, saat bersama narasumber dan pada perusahaan media. Dilapangan, profesi jurnalis memang syarat akan bahaya. Jurnalis harus dituntut memiliki kualitas, kecakapan, mental, bahkan fisik yang kuat. Bagi wanita, pilihan profesi menjadi wartawan tentunya lebih berat posisinya. Sebagai seorang pewarta, jurnalis perempuan harus turun ke lapangan mencari info atau sekedar melakukan wawancara. Dilapangan jurnalis perempuan berkemungkinan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter. Sementara, jurnalis sebagai

profesi 'male sentris' belum mampu memberikan jaminan perlindungan bagi para jurnalis perempuan bahkan di saat mereka sedang bertugas. Saat jurnalis perempuan harus melakukan liputan di lapangan, ia tidak hanya menghadapi dominasi struktural dan kultural tetapi juga ekonomi dan lainnya. faktor relasi kuasa di lapangan, menyebabkan jurnalis perempuan rentan mendapat perlakuan kekerasan, intimidasi, diskriminasi, penolakan, ancaman, hingga pelecehan seksual.

Pekerjaan jurnalis menuntut jurnalis perempuan harus mampu menjalani tugas apa saja sesuai dengan kepentingan berita, seperti ke lokasi kriminal, rawan konflik, bencana dan lokasi lainnya. Selain itu sistem kerja wartawan yang berlomba dengan waktu dan deadline, membuat pekerjaan jurnalis tidak memiliki jam kerja, mereka harus siap ditugaskan siang dan malam. Kondisi ini menjadi wajar dan biasa jika sang pewarta berasal dari kalangan pria, sementara menjadi sangat berbahaya bagi kelompok wanita. Dengan kata lain, kekerasan dan resiko yang dialami jurnalis perempuan bukan terjadi karena resiko profesinya tetapi terjadi dikarenakan jenis kelaminnya.

Ancaman kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga sering terjadi ketika proses peliputan dan wawancara bersama narasumber. Dalam meliput berita, jurnalis akan dihadapkan dan bertemu dengan berbagai watak, profesi dan latar belakang informan. Kebutuhan akan informasi dan data berita yang harus segera diterbitkan sering disalahgunakan oleh narasumber sebagai kesempatan untuk menggoda dan menekan jurnalis perempuan. Informasi baru bisa diberikan ketika jurnalis bersedia mengikuti permintaan narasumber. Berdasarkan diskusi tertutup dalam forum pelatihan jurnalis berbasis Gender yang diadakan oleh AJI Padang, diketahui pernah terjadi peristiwa kasus kekerasan pada jurnalis perempuan di Sumbar, yang mendapat

perlakuan tidak senonoh dari narasumber. Sang jurnalis perempuan dipaksa melakukan perbuatan oral seks oleh sang narasumber, dengan iming-iming akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Kejadian tersebut sempat membuat jurnalis tersebut mengalami trauma.

Pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh jurnalis perempuan, kian menjadi persoalan ketika ancaman berbasis gender justru muncul dari internal profesinya, rekan sesama jurnalis, terutama jurnalis pria tak luput menjadi pelaku pelecehan terhadap jurnalis perempuan. Meski tidak formal, namun kekerasan terjadi dalam bentuk rayuan, body shaming, *cat calling* atau berupa sentuhan tak wajar. Masih dalam Forum Diskusi yang sama, didapati pengakuan seorang jurnalis online perempuan di Sumatera Barat, mengaku kerap mendapat perlakuan tidak pantas, rayuan, candaan, ejekan, hingga pendiskriminasi dari rekan laki-lakinya hanya karena penampilannya yang modern dan berbeda. Pelecehan pelecehan yang terjadi pada rekan sesama jurnalis berakhir menjadi pembiaran, karena dianggap sebagai dinamika dan kebiasaan pergaulan. Sementara itu, perbandingan jumlah jurnalis laki laki dan perempuan yang tek setara, sering membuat suara jurnalis perempuan kalah dan tak sanggup melawan laki-laki.

Perusahaan atau industri media yang seharusnya menjadi ruang aman dan memberikan perlindungan kepada perempuan ternyata juga tak memberi ruang aman bagi jurnalis perempuan. Diskriminasi dan ketidakadilan kesempatan dalam berkarir, menjadi persoalan yang krusial bagi jurnalis perempuan dalam perusahaan media. Hal yang paling disoroti dari ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja terutama industri media yaitu persoalan perbedaan upah, perbedaan tipe pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja

laki-laki dan pekerja perempuan, kesulitan para pekerja perempuan untuk menduduki posisi jabatan tinggi, yang biasa disebut dengan *glass ceiling*. Daftar nama jurnalis yang dikenal publik sebagian besar pasti diisi oleh laki-laki. Sebaliknya, bagi pekerja perempuan, mereka sering kali ditempatkan sebagai reporter studio, presenter, posisi yang santai atau sebagai redaktur yang bekerja di balik layar dengan menggunakan komputer. Dalam pembagian distribusi pekerjaan peliputan, sering kali timbul ketidakpercayaan dalam memberikan tugas kepada perempuan. Sehingga yang selalu mendapat tugas peliputan penting adalah kaum laki laki. Hal ini berdampak tidak banyaknya perempuan yang mampu mengisi posisi penting di dalam industri media.

Kebanyakan jurnalis perempuan berada pada posisi bawah, dan sulit untuk berkembang. Hal ini diakui oleh seorang informan yang bekerja sebagai jurnalis media online nasional. Informan yang mendapatkan upah sesuai jumlah berita yang terbit, merasa terdiskriminasi dari jurnalis laki laki. Pasalnya tak banyak ruang berita yang dapat dikerjakan, hanya seputar berita politik dan berita ringan. Sementara untuk berita peristiwa dan kriminal, pimpinan selalu menugaskan dan mempercayai laki laki. Standar media nasional, hanya berita terpilih dan bernilai jual tinggi yang akan diterbitkan, dan biasanya seputar kriminal dan peristiwa, sehingga acapkali berita yang ia kerjakan urung terbit, alhasil informan tak mendapatkan upah selayaknya.

Ketidakpercayaan perusahaan media akan kemampuan jurnalis perempuan dalam melakukan peliputan. juga berdampak pada kepercayaan diri jurnalis perempuan. Adanya pemarginalan posisi jurnalis perempuan dalam penugasan liputan, membuat ruang gerak dan kesempatan perempuan menghasilkan liputan yang bernilai tinggi

terbatas, perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibanding jurnalis laki-laki, sehingga jurnalis perempuan cenderung stuck di posisi karier bawah dan lama untuk bisa memperoleh jenjang karir di atasnya. Tidak adanya kesempatan, dan ketidakcukupan gaji yang diperoleh, membuat jurnalis perempuan cenderung tidak bertahan dan beralih mencari profesi dan pekerjaan lain. Data dari AJI Padang, mayoritas jurnalis perempuan berada pada posisi karir bawah setingkat reporter dengan status pekerjaan kontrak atau *contributor* yang mendapat bayaran dihitung dari berapa banyak berita yang dihasilkan. Jurnalis perempuan cenderung berada pada garis belum sejahtera dalam kategori pendapatan dan salary. Hal yang senada juga disampaikan oleh ketua FJPI Sumatera Barat. Nita membenarkan kondisi jurnalis perempuan saat ini memiliki kesejahteraan yang masih kurang. *“Tidak banyak perempuan berada di posisi tinggi, pelecehan di Sumbar ini mungkin tidak terlalu terjadi ya, tetapi kesempatan dan peluang bagi jurnalis perempuan yang terbatas, serta tidak adanya tempat dan aturan perlindungan bagi mereka”*.

Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh petinggi salah satu perusahaan media Tv lokal Sumatera Barat. Ia menilai tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dunia jurnalis. Di media tempat ia bekerja, bahkan direktur utamanya adalah seorang perempuan. Tak hanya itu berbagai jabatan strategis lainnya, seperti pimpinan redaksi, produser dan lainnya bahkan pernah dipegang oleh perempuan. Setiap penugasan peliputan dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan, selagi jurnalis itu mampu, maka pihak perusahaan akan memberikan kepercayaan penuh. Permasalahannya adalah ketika ketidakmampuan tersebut datang dari jurnalis perempuan itu sendiri. Banyak jurnalis perempuan yang

tidak bersedia ditugaskan malam hari karena alasan di larang orang tua, ada juga jurnalis perempuan yang telah bekeluarga sehingga harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak, dan berbagai pertimbangan dari pribadi perempuan itu sendiri. Sementara itu, untuk pemenuhan hak-hak perusahaan, setiap media tentu beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ada namanya undang-undang ketenaga kerjaan dan lainnya. Pihak perusahaan tetap berusaha menaati apapun jaminan, upaya perlindungan serta pemenuhan hak pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, seperti ada cuti hamil, cuti melahirkan, dan lainnya.

Jhon Nedy Kambang, Ketua Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB), yang juga reporter Trans TV dan CNN, juga Detik.com juga mengatakan saat ini peran jurnalis laki-laki dan perempuan itu sama. Keduanya berkesempatan bisa meliput apa saja, termasuk kejadian bencana. Persoalannya apakah mereka mampu atau tidak, apakah mereka berani apa tidak, apakah mereka mau atau tidak. Profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang membutuhkan keprofesionalan. Untuk itu, siapapun jurnalisnya, mau laki-laki ataupun perempuan harus mampu menunjukkan kualitasnya. Terkhusus untuk liputan bencana, jurnalis bencana harus memiliki pengetahuan yang cukup, harus mengetahui medan, harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke lokasi bencana, jangan sampai melaksanakan tugas kantor tanpa persiapan yang cukup, turun kelapangan tanpa pengetahuan, sehingga justru malah akan menimbulkan bencana sendiri. Lebih lanjut, menurut Jhon, keberadaan jurnalis perempuan di Sumatera Barat saat ini telah jauh lebih baik. Kemampuan jurnalis perempuan *survive* di lapangan pun tak kalah dengan kaum pria. Hal ini dibuktikan, terdapat sejumlah jurnalis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Jurnalis Siaga

Bencana (JJSB) yang aktif meliput dan tak segan turun langsung meliput kondisi bencana yang tentu berbahaya dan mengancam jiwa.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) wilayah Sumbar, Defri mulyadi mengatakan pekerjaan jurnalis memang pekerjaan yang penuh resiko, terlepas apakah itu perempuan atau laki-laki. Memang hingga saat ini masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh jurnalis perempuan khususnya. Kasus kekerasan secara fisik yang dialami anggota IJTI yang perempuan memang belum pernah dilaporkan, akan tetapi kekerasan secara visual, verbal atau seperti godaan dan rayuan memang sering terjadi dan diadukan. Terkhusus untuk jurnalis perempuan televisi, hambatan yang utama adalah waktu. Menjadi jurnalis televisi, mewajibkan seorang perempuan harus turun kelapangan memburu gambar dalam waktu dan kondisi apapun. Kondisi ini berbeda bagi jurnalis cetak, online atau pewarta tulis yang dapat menulis dimana saja. Ketika dihadapkan dengan kebutuhan waktu yang tak tentu dan tanpa batas, jurnalis perempuan kerap mengalami benturan. Banyak dari jurnalis perempuan yang harus membagi waktu mereka dengan waktu mengurus keluarga, tak mendapat izin disaat jam-jam malam, hingga halangan stigma masyarakat bahwa perempuan keluar malam itu bukan perempuan baik. Hal ini mengakibatkan dari jurnalis perempuan televisi di Sumatera Barat jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan perempuan di media televisi lebih memilih bekerja di studio dan dibalik Komputer. Sementara itu, mengenai tingkat kesejahteraan. Baik laki-laki ataupun perempuan mengalami persoalan yang sama. Masih banyak jurnalis yang belum masuk dalam kategori sejahtera.

Pandangan berbeda justru muncul dari jurnalis perempuan di Sumatera Barat sendiri. Sejumlah jurnalis perempuan yang tergabung di dalam organisasi

forum jurnalis perempuan Indonesia wilayah sumbar mengaku tidak terlalu menemukan kendala selama menekuni profesi sebagai pewarta. Tidak menampikkan bahwa dilapangan masih terdapat perlakuan perlakuan yang tidak pantas, namun itu hanya disebabkan oleh "oknum". Budaya Sumatera Barat, yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat perempuan justru dinilai sangat membantu mereka dalam menjalani profesi jurnalis.

*"Orang orang sumbar ini sangat menghargai perempuan, justru ketika dilapangan, mereka lebih menjaga dan melindungi. Jika memang ada pelanggaran pelanggaran keluar malam, itu lebih bersifat melindungi. Namun ketika tahu jika perempuan yang keluar malam itu seorang jurnalis, maka masyarakat bahkan teman teman sesama jurnalis akan sontak menjaga dan melindungi. Begitupun dari keluarga, sangat mendukung dan mengerti".* Ungkap ketua FJPI Sumbar.

Resiko dan kondisi yang dihadapi perempuan dilapangan lebih lanjut tergantung bagaimana jurnalis perempuan itu sendiri. Seorang jurnalis perempuan hendaknya memiliki sikap, kepribadian dan pembawaan yang baik. Ia harus tahu bagaimana cara bersikap, berpakaian bahkan harus mengenal dahulu medan dan lapangan yang akan mereka tuju. Sebelum terjun ke lapangan, perempuan harus menyiapkan diri, pengetahuan, mental bahkan alat alat yang dibutuhkan untuk melindungi diri dia sendiri. Profesi jurnalis merupakan profesi yang membutuhkan keterampilan dan keahlian. Jika kedua ini tidak dimiliki, maka baik jurnalis laki-laki ataupun perempuan akan rentan menemui kendala bahkan kondisi yang membahayakan di lapangan. Hingga saat ini satu satunya regulasi yang menaungi profesi kejournalistikan adalah undang-undang pers. Terkait regulasi perlindungan jurnalis perempuan, sampai saat ini baik tingkat nasional ataupun

terkhusus Sumatera Barat belum ada. Adapun salah satu wadah bagi jurnalis perempuan agar bisa mendapatkan perlindungan, yakni dengan bergabung dengan organisasi kewartawanan. *"Sejauh ini jurnalis perempuan tidak memiliki tempat mengadu jika memang mengalami kekerasan, paling cuma melapor ke organisasi jika tergabung ke organisasi".* Ungkap Ketua forum Jurnalis Perempuan sumbar.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia mengaku menjadi pihak yang sangat mendorong terciptanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau regulasi khusus yang jurnalis perempuan. SOP diperlukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi perempuan dalam bekerja, karena pekerjaan jurnalis ini penuh resiko. Saat ini melalui FJPI pusat yang dikomandio Uni Lubis dan beberapa tim dari kementerian tengah menginisiasi SOP tentang tata kerja jurnalis perempuan dan bagaimana pengamanannya, Sementara itu, Baik AJI Padang ataupun IJTI Sumbar mengaku siap menjadi Lembaga pendampingan dan melakukan pembelaan bagi jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan dalam menjalani tugas kewartawanan. AJI sendiri saat ini terus mendesak agar pemerintah dan instansi terkait seperti Komnas Perempuan segera membuat Mekanisme Perlindungan Bagi Jurnalis Perempuan. Di Sumatera Barat, berbagai organisasi jurnalis telah bekerja dan berkomitmen mampu mewadahi dan melindungi anggota pewarta yang mengalami kasus kekerasan, diantara organisasi tersebut ada AJI Padang, IJTI, PWI, FJPI dan bekerjasama dengan lembaga hukum dan LSM lainnya seperti LBH Pers dan Wcc Nurani perempuan.

## KESIMPULAN

Kondisi jurnalis Perempuan Sumatera Barat tak jauh berbeda dengan Jurnalis perempuan daerah lain. Selain

resiko profesi jurnalis yang penuh tantangan harus dihadapi, jurnalis perempuan juga terpaksa menerima resiko karena atribut keperempuanan akibat kontruksi budaya yang melekat saat turun ke lapangan. Secara umum, berbagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam prakteknya masih terjadi. Namun, di Sumatera Barat kasus Kekerasan fisik dan pelecehan secara seksual terhadap jurnalis perempuan tak banyak ditemukan. Kasus kasus yang ditemukan hanya bersifat verbal dan bisa dikomunikasikan. Ada dua faktor penyebab hal itu terjadi, pertama, terdapat kasus namun jurnalis perempuan urung bersuara dan dianggap wajar sebagai resiko profesi. Kedua, jumlah kasus kekerasan minim terjadi dikarenakan budaya matrilineal yang dinilai sedikit banyaknya mampu melindungi jurnalis perempuan. Adanya penghormatan terhadap perempuan dalam budaya Minangkabau, membuat perempuan di minangkabau lebih disegani, dijaga bahkan cenderung dilindungi.

Saat ini, regulasi yang mengatur perlindungan dan tata cara khusus profesi jurnalis perempuan masih belum tersedia. Perempuan tidak akan mampu melawan sendiri ketika terjadi ketidakadilan, maka dibutuhkan suatu Lembaga atau organisasi sebagai wadah tempat jurnalis perempuan mengadu dan meminta perlindungan. Sehingga baiknya para jurnalis perempuan membuat organisasi yang terlegalitas atau bergabung dengan organisasi formal agar dapat mempertahankan dirinya sebagai jurnalis perempuan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bire, R. M., Mas'amah, & Tangu Hana, F. (2019). Perempuan dan Jurnalisme: Studi Fenomenologi Terhadap Profesionalisme Jurnalis Perempuan di Kota Kupang. *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 1(1), 31-38. <https://doi.org/10.51977/jdigital.v1i1.162>
- Clay, C. (2013). *The Woman Journalist, 1920-1945* (pp. 199-214). Palgrave Macmillan UK.
- Farhadpour, L. (2016). Women, gender roles, media and journalism. In *Women, power and politics in 21st century Iran* (pp. 91-106). Routledge.
- Hardiyanti, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.19184/idx.v2i2.24959>
- Harris, J., Mosdell, N., & Griffiths, J. (2020). Gender, risk and journalism. In *The Future of Journalism: Risks, Threats and Opportunities* (pp. 239-253). Routledge.
- Herawati, M. (2016). Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media Di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 84-94. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n1.8>
- Isma Aryani, D. (2021). *Perempuan Volume 1 Perempuan dan Media* (Vol. 01, pp. 1-25). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/355094358>
- Komnas perempuan. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Jakarta, 7 Maret 2023
- Oktavianti, R. (2021). *Perempuan Dalam Bingkai Media Dan Gerakan Feminisme (Media Framing of Women and the Feminist Movement)*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/358816780>
- Parlinda, M., Malaka, T., & Novrikasari, N. (2020). Hubungan Tuntutan Pekerjaan Terhadap Kejadian Stres Kerja Pada Jurnalis Perempuan Di Kota Palembang. *Jurnal media kesehatan*, 13(2), 89-99. <https://doi.org/10.33088/jmk.v13i2.571>
- Pusparini, D., & Swardhana, G. M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan

- Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 187. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p15>
- Rahim, A., Siswoyo, M., & Hermawan, A. J. (2022). Citra Perempuan Dalam Media Massa (Analisis Framing William A. Gamson dan Andre Modigliani Pada Artikel Worklife Di Website Wolipop). *JURNAL SIGNAL*, 10(1), 106. <https://doi.org/10.33603/signal.v10i01.6964>
- Rani Zubaida. (2021). Media Massa Vs Media Sosial: Konstruksi Realitas Perempuan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 580–591. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.239>
- Ross, K. (2001). Women at work: Journalism as en-gendered practice. *Journalism studies*, 2(4), 531-544.
- Setiadarma, D. (2022). Idealisme Jurnalis TV vs Kepentingan Pemilik Media. In *Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media* (pp. 63–77). Lembaga Penelitian, Publikasidan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR. <https://doi.org/10.37535/20320220105>
- Setyowati, R. M., Watie, E. D. S., & Tatas, H. L. (2024). Jurnalis Perempuan Dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 6(1), 64–78. <https://doi.org/10.54783/jin.v6i1.888>
- Simanjuntak, I. A., & Perwirawati, E. (2023). Representasi Budaya Patriarki Perempuan Jurnalis Dalam Film "BOMBSHELL." *Network Media*, 6(1), 12–21. <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3016>
- Steiner, L. (2012). Failed theories: Explaining gender difference in journalism. *Review of Communication*, 12(3), 201-223.
- Stellarosa, Y., & Silaban, M. W. (2019). Perempuan, media dan profesi jurnalis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 97. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18844>
- Volcic, Z. (2008). Media, identity, and gender: tracking feminist media and journalism theories and methodologies. *Media Research: Croatian Journal for Journalism and Media*, 14(1), 5-20.
- Widiarini, A. D., Karlinah, S., & Herawati, M. (2019). Pemaknaan Perempuan Jurnalis Televisi Di Kota Bandung Terhadap Profesi Jurnalis. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21075>
- Widyaningtyas, M. D., Abdullah, A., Karlinah, S., & Priyatna, A. (2023). Tantangan Profesi Jurnalis Perempuan dalam Liputan di Wilayah Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 195. <https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.7725>